

RINGKASAN

ERNA ROCHANA, P 31600021. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang Jawa Barat. Dibimbing oleh **KOOSWARDHONO MUDIJDJO** sebagai ketua komisi, **LUKY ADRIANTO** dan **SUGENG BUDIHARSONO** sebagai anggota.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan yang telah lama dikenal, bahkan sejak beberapa abad yang silam, sehingga termasuk persoalan kuno. Meski kajian telah banyak dilakukan, namun para pakar masih terus mengkajinya. Bukan sekedar mengulang-ulang apa yang telah dilakukan sebelumnya, namun realitas kemiskinan yang mengalami perkembangan, dan proses perbaikan pemahaman serta kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh persoalan ini menjadikan kajian terhadapnya tetap menarik. Analisis baru tetap diperlukan untuk membantu mengurangi penderitaan orang miskin saat ini, yang masih banyak jumlahnya. Berdasarkan data Biro Statistik Tahun 2003, diketahui ada sekitar 37.3 juta jiwa atau 17.4 persen dari total penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin.

Banyak cerita sukses yang dilaporkan berhasil mengeluarkan sejumlah orang/rumah tangga dari keadaan miskin, tetapi pada saat yang sama sejumlah orang yang lain justru jatuh menjadi miskin. Datang dan pergi silih berganti, sehingga angka kemiskinan sulit untuk turun karena jumlah orang yang pergi seimbang dengan yang datang. Sementara tidak kurang banyak juga cerita tentang kegagalan usaha penanggulangan kemiskinan. Akibatnya jumlah orang/rumah tangga miskin masih cukup banyak. Sebagian miskin sementara karena berbagai hal, sebagian yang lain miskin kronis dengan penderitaan yang berkepanjangan. Mereka yang menghadapi kemiskinan kronis memiliki karakteristik yang berbeda dari kemiskinan sementara, sehingga kebijakan dan aksi sosial yang diperlukan juga berbeda, sebagaimana perbedaan desa-kota, pedalaman dan pesisir.

Kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh banyak faktor penting yang berperan dalam kajian kemiskinan baik secara kultural maupun struktural bahkan juga natural, sehingga memerlukan pendekatan khusus. PPAAs sebagai pendekatan partisipatif untuk memahami kemiskinan dari suatu Kebijakan Pembangunan dan *Coastal Livelihood System Analisis (CLSA)*, sebagai sistem analisis yang mencermati seluruh aset (sumberdaya alam, manusia, sosial, keuangan dan sarana – prasarana) suatu masyarakat diharapkan dapat memperjelas hubungan sebab kultural yang bersifat mikro dengan sebab struktural yang bersifat makro, serta natural di tingkat meso.

Meskipun hasil pembangunan dilaporkan terus meningkat, tetapi angka kemiskinan penduduknya juga meningkat. Di lokasi penelitian 80% penduduknya dalam kemiskinan multidimensi, 36% diantaranya kronis. Kedalaman kemiskinan mencapai 0.20 hingga 0.23 dengan keparahan antara 2.89 hingga 4.67. Kemiskinan masyarakat pesisir Kabupaten Subang karena faktor natural, kultural dan juga struktural.

Kondisi aset kapital di kedua desa lokasi penelitian berada di bawah potensi maksimal (ideal) bahkan tidak mencapai nilai 50%. Lemahnya pengelolaan sumberdaya di Patimban menyebabkan kerusakan sumberdaya alam (*natural asset*), akibatnya barang yang dihasilkan (ikan) tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya (miskin) dan rawan terhadap bencana. Sementara lemahnya pengelolaan di Pangarengan menjadikan sumberdaya alam tidak memiliki nilai tambah yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat (miskin-terisolir) karena tidak dilengkapi sarana dan prasarana (*man-made*) dasar yang memadai.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang cenderung pada pendekatan sektoral, belum menunjukkan komitmen yang *pro coastal* dan *pro poor*. Prioritas program dan sasaran pembangunan terfokus pada usaha mendongkrak PAD, sementara perhatian terhadap kelompok miskin terbatas pada harapan dapat terbantu dari perkembangan kelompok produktif yang prospektif (sebagai *trickle down effect*). Pekerjaan yang menjadi mata pencaharian penduduk adalah perikanan, pertanian dan informal (ojek, pembantu rumah tangga, ngamen, kuli bangunan, PSK). Preferensi generasi muda mengarah kepada sektor industri termasuk pariwisata (hiburan), sementara preferensi terhadap sektor perikanan dan pertanian rendah. Realitas ini perlu perhatian khusus, karena hilangnya keterikatan mereka terhadap pekerjaan yang tergantung pada sumberdaya alam juga berarti hilangnya perhatian dan empaty untuk mengelola dan menyelamatkan sumberdaya alam tersebut. Sementara pengelolaan sektor perikanan yang baik dan terpadu dapat diharapkan sebagaimana di daerah lain (Blanakan) yang telah menikmati kesejahteraan melimpah. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang sangat rentan memerlukan partisipasi (kepedulian) memperbaiki, menjaga, dan melestarikan (mengkonservasi) dari masyarakat demi menjamin ketersediaan gizi masyarakat (dari ikan yang berprotein tinggi). Bukan itu saja tetapi perikanan tangkap dapat berperan sebagai lokomotif perekonomian daerah, yang nantinya diharapkan turut menanggulangi kemiskinan mereka secara berkelanjutan.

Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Subang yang akan datang seyogyanya *pro-coastal* dan *pro-poor*, dengan pendekatan yang terpadu. Pengelolaan sumberdaya pesisir dengan manajemen ekowisata sebagai sintesa mata pencaharian industri pariwisata, pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan perlu dipertimbangkan untuk keberlanjutan proses pembangunan daerah. Di Patimban pengembalian lahan kepada fungsi ekologisnya (penanaman mangrove sepanjang pantai yaitu 10 km dengan lebar minimal 100 m) diharapkan menjadi obyek wisata yang dapat membangkitkan usaha ekonomi keluarga masyarakat lokal, dan juga bermanfaat untuk melindungi pantai dari hantaman ombak (abrasi) dan menyediakan habitat bagi pengembangan biota laut (ikan). Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai prioritas program yang didukung dengan anggaran yang jelas.

Di Pangarengan disamping memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat pengembangan ekowisata perlu dukungan sarana jalan raya sepanjang 15 km dan jembatan yang memadai agar sumberdaya alamnya memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakatnya.